



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Raden Puguh Praya-Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lt 4

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN OPERASIONAL,
NERACA, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

TAHUN ANGGARAN

2022



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Urusan Pemerintahan : 4. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.02. Pengawasan
Unit Organisasi : 4.02.01. Inspektorat Daerah

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah				
4.1.02	Retribusi Daerah				
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		36,783,981.10		7,706,632.74
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	36,783,981.10		7,706,632.74
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0	36,783,981.10		7,706,632.74
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	10,388,685,925.00	9,989,989,044.00	96.16	8,965,927,351.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,100,512,094.00	3,531,758,631.00	86.13	3,265,220,897.00
	Jumlah Belanja Operasi	14,489,198,019.00	13,521,747,675.00	93.32	12,231,148,248.00
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375,053,409.00	371,923,000.00	99.17	425,446,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	375,053,409.00	371,923,000.00	99.17	425,446,000.00
	JUMLAH BELANJA	14,864,251,428.00	13,893,670,675.00	93.47	12,656,594,248.00
	SURPLUS/DEFISIT	(14,864,251,428.00)	(13,856,886,693.90)	93.22	(12,648,887,615.26)

Praya, 11 Februari 2023
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
Inspektur

f Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM.
NIP. 19681231 198903 1 065



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

AKUN AKRUAL	URAIAN	DINAS INSPEKTORAT			
		SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN /(PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
4	PENDAPATAN DAERAH-LO	36,783,981.10	7,706,632.74	0	0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36,783,981.10	7,706,632.74	0	0
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0			
4.1.2	Retribusi Daerah	0			
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0			
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	36,783,981.10	7,706,632.74		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0	0	0	0
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0			
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0			
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0			
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0	0	0	0
4.3.1	Pendapatan Hibah	0			
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Und	0			
	JUMLAH PENDAPATAN	36,783,981.10	7,706,632.74	0	0
5	BEBAN DAERAH				
5.1	BEBAN OPERASI	14,206,432,314.96	12,546,977,389	0	0
5.1.1	Beban Pegawai	10,321,534,790.00	8,961,421,161.00		
5.1.2	Beban Barang dan Jasa	3,531,422,231.00	3,262,838,497.00		
5.1.3	Beban Bunga	0			
5.1.5	Beban Hibah	0			
5.1.6	Beban Bantuan Sosial	0			
	Beban Penyisihan	0			
	Beban Lain-lain	0			
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	353,475,293.96	322,717,731.00		
	Beban Transfer/Beban Bantuan Keuangan	0			
	Beban Tak Terduga	0			
	JUMLAH BEBAN	14,206,432,314.96	12,546,977,389.00	0	0
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	- 14,169,648,333.86	- 12,539,270,756.26	0	0
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	0	0	0	0
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	0			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0			

		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek	-	0			
		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	0			
		DEFISIT NON OPERASIONAL		0	0	0	0
		Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non		0			
		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0			
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0			
		JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0	0	0
		SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-	14,169,648,333.86	-	12,539,270,756.26	0
		POS LUAR BIASA					
		Pendapatan Luar Biasa		0			
5.3.1.01.01		Beban Luar Biasa		0			
		SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	0
		SURPLUS/DEFISIT - LO	-	14,169,648,333.86	-	12,539,270,756.26	0

Praya, 8 Februari 2023

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

Inspektur



Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM.
NIP. 19681231 198903 1 065





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 1 DESEMBER 2022 dan 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	942,804,179.40	833,187,320.40
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(14,169,648,333.86)	(12,539,270,756.26)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	9,031,135.00	-
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	10,000,000.00	-
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(968,865.00)	-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	13,856,886,693.90	12,648,887,615.26
4	EKUITAS AKHIR	639,073,674.44	942,804,179.40

Praya, 9 Februari 2023

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

Inspektur

Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM.
NIP. 19681231 198903 1 065



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di BLUD	-	-
7	Setara Kas	-	-
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
9	Kas di Bendahara BOS	-	-
10	Kas lainnya	-	-
11	Piutang Pendapatan	-	-
12	Piutang Pajak Daerah	-	-
13	Piutang Retribusi Daerah	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
15	Piutang Lain-lain PAD	-	-
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
17	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
18	Piutang Lainnya	-	-
19	Uang Muka Pekerjaan	-	-
20	Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
21	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-
23	Persediaan	993,400.00	657,000.00
24	JUMLAH ASET LANCAR	993,400.00	657,000.00
25			
26	ASET TETAP		
27	Tanah	-	-
28	Peralatan dan Mesin	3,736,128,119.75	3,366,090,619.75
29	Gedung dan Bangunan	-	-
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
31	Aset Tetap Lainnya	940,000.00	940,000.00
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
33	Akumulasi Penyusutan	(2,762,839,983.31)	(2,420,281,324.35)
34	JUMLAH ASET TETAP	974,228,136.44	946,749,295.40
35			
36	ASET LAINNYA		
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
38	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
39	Aset Tidak Berwujud		
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
41	Aset Lain-lain	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
43	JUMLAH ASET LAINNYA	-	-
44			
45	JUMLAH ASET	975,221,536.44	947,406,295.40
46			
47	KEWAJIBAN		
48	Kewajiban Jangka Pendek		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
50	Utang Bunga	-	-
51	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
52	Utang Belanja	336,147,862.00	4,602,116.00

NO	URAIAN	2022	2021
53	Utang Transfer	-	-
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	336,147,862.00	4,602,116.00
56			
57	JUMLAH KEWAJIBAN	336,147,862.00	4,602,116.00
58	EKUITAS		
59	EKUITAS	639,073,674.44	942,804,179.40
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	975,221,536.44	947,406,295.40

Praya, 5 Februari 2023
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
Inspektur


Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM.
NIP. 19681231 198903 1 065





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi keterukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah Basis Akrua, untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, berarti bahwa pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan.

- a) Basis Akrua untuk Laporan Operasional berarti bahwa :
 1. Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima.

2. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah/Kas SKPD.
- b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
- 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c) Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana yang disajikan dalam Neraca diakui berdasarkan Basis Akrua, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

1.3 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1. Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi. Akuntansi Pendapatan dilakukan berdasarkan Azas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2. Akuntansi Belanja (LRA)

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

3. Akuntansi Surplus Defisit

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit - LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

B. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan menurut PP no 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

b. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu; Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Bukan Pajak –LO, Pendapatan Hibah-LO, Pendapatan Lainnya. Pendapatan-LO diakui saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah:

- Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi)

Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan.

2. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Klasifikasi Beban

1) Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

2) Beban Transfer

Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak, Beban bagi Hasil Pendapatan lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya.

3) Beban Non Operasional

Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari:

- Defisit Penjualan Aset Non Lancar.
- Defisit penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang.
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

4) Beban Luar Biasa

Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa.

Yang termasuk kejadian luar biasa adalah:

- Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran.
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- Kejadiannya diluar kendali pemerintah.

Beban diakui saat :

✓ Timbulnya kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.

✓ Terjadinya konsumsi aset

Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

✓ Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

✓ Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan.

Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.

3. Akuntansi Surplus Defisit – LO

Surplus –LO adalah selisih lebih antara Pendapatan- LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Defisit - LO adalah selisih kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana (*Net Aset*).

1) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- (1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan *stock opname* yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau memberikan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat

seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi Permanen Lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh Dana Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat. Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, Irigasi dan Jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah

dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap. Termasuk Aset Lainnya antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan Uang Negara/Daerah atau menghilangkan Aset Pemerintah/Pemerintah Daerah. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah. Aset ini merupakan kewenangan PPKD bukan SKPD,

sehingga dalam laporan keuangan SKPD Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tidak terdapat Tagihan Jangka Panjang/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Namun data ini muncul di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(4) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban muncul antara lain karena Sumber Pembiayaan Pinjaman dari Masyarakat, Lembaga Keuangan, Entitas Pemerintah Lain, atau Lembaga Internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang ke dalam Bagian Lancar Utang Jangka Pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)

Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH) merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang pemerintah terdiri dari Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp36.783.981,10** yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian uang dan Barang, Denda Keterlambatan, Pendapatan dari Pengembalian dan Penerimaan lain-Lain.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	36.783.981,10	0,00
Jumlah		0,00	36.783.981,10	0,00

Rincian Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian*	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	36.783.981,00	0,00
4.	Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
5.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	36.783.981,00	0,00

2.2 Belanja - LRA

Dari Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah mengalami *Recofussing* sebesar **Rp14.864.251.428,00** realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp13.893.670.675,00** atau **93,47%**, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	14.489.198.019,00	13.521.747.675,00	93,32%
2.	Belanja Modal	375.053.409,00	371.923.000,00	99,17%
Jumlah		14.864.251.428,00	13.893.670.675,00	93,47%

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp13.521.747.675,00** atau **93,32%** dari anggaran sebesar **Rp.14.489.198.019,00**. Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	10.388.685.925,00	9.989.989.044,00	96,16%
2.	Belanja Barang dan Jasa :			
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00
	2) Barang jasa selain hibah	4.100.512.094,00	3.531.758.631,00	86,13%
Jumlah		14.489.198.019,00	13.521.747.675,00	93,32%

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar **Rp9.989.989.044,00** dari anggaran sebesar **Rp10.388.685.454.925,00** atau **96,16%** dari target Belanja pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

No.		Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA PEGAWAI			
1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.386.146.602,00	4.386.806.960,00	100,02
2	Belanja Tunjangan Keluarga	428.018.716,00	425.632.051,00	99,44
3	Belanja Tunjangan Jabatan	156.890.250,00	156.965.000,00	100,05
4	Belanja Tunjangan Fungsional	717.820.500,00	673.055.000,00	93,76
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	39.960.250,00	90.390.000,00	226,20
6	Belanja Tunjangan Beras	250.381.287,00	248.907.540,00	99,41
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.622.361,00	30.765.923,00	100,47
8	Belanja Pembulatan Gaji	62.842,00	66.464,00	105,76
9	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.987.917.000,00	3.973.788.106,00	90,94
10	Belanja Honorarium	8.862.000,00	3.612.000,00	40,76
	JUMLAH	10.388.685.925,00	9.989.989.044,00	96,16

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp4.100.512.094,00** dan terealisasi sebesar **Rp3.531.758.631,00** atau **86,13%** sampai dengan Bulan Desember 2022 dirinci sebagai berikut:

BELANJA BARANG JASA	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Bahan Habis Pakai	712.107.094,00	639.628.550,00	89,82%
Belanja Jasa Kantor	705.680.000,00	359.976.615,00	51,01%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	432.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
Belanja Pemeliharaan	45.500.000,00	45.491.901,00	99,98%
Belanja Perjalanan Dinas	2.441.673.000,00	2.300.661.565,00	94,22%
Belanja kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Tekhnis PNS	135.120.000,00	126.000.000,00	93,25%
JUMLAH	4.100.512.094,00	3.531.758.631,00	86,13%

b.) Belanja Modal

Anggaran untuk belanja modal tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp375.053.409,00** dan realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar **Rp371.923.000,00**. Berikut rinciannya:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	375.053.409,00	371.923.000,00	99,17%
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		375.053.409,00	371.923.000,00	99,17%

Realisasi belanja modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.219.000,00	32.219.000,00	100,00
2.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
3.	Belanja Modal Mebel	114.660.200,00	111.530.000,00	97,27%
4.	Belanja Modal Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
5.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	7.674.209,00	7.674.000,00	100,00
6.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	109.500.000,00	109.500.000,00	100,00
7.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00
Jumlah		375.053.409,00	371.923.000,00	99,17

2.3 Surplus/Defisit LRA

Dari anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maka terjadi Defisit anggaran adalah sebesar **Rp(13.856.886.693,90)**.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan LO pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebesar **Rp36.783.981,10** yang terdiri dari pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran Barang/Jasa.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	36.783.981,10	0,00
Jumlah		0,00	36.783.981,10	0,00

3.2 Beban- LO

a. Beban Operasi

Beban Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp14.206.432.314,96**. Beban Operasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Beban Operasi	Realisasi
1	Beban Pegawai	10.321.534.790,00
2	Beban Persediaan	639.292.150,00
3	Beban Jasa	561.468.516,00
4	Beban Perjalanan Dinas	2.300.661.565,00
5	Beban Penyusutan	353.475.293,96
JUMLAH BEBAN		14.206.432.314,96

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Realisasi Belanja Pegawai di tambah dengan Beban Gaji Pegawai yang belum dibayar sampai dengan bulan Desember 2022 dan ditambah dengan Tambahan Penghasilan PNS yang belum dibayar sampai dengan bulan Desember 2022, dikurangi hutang beban Pegawai 2021 yang sudah terbayar di tahun 2022 Berikut perhitungannya :

- Realisasi Belanja Pegawai	Rp6.012.588.938,00
- Kekurangan Gaji Pegawai yang belum di bayar :	
Gaji Pokok	Rp6.964.420,00
Tunjangan Keluarga	Rp 857.456,00
Pembulatan	<u>Rp 1.700,00</u>
- Jumlah Kekurangan Gaji:	Rp 7.823.576,00
- Hutang Beban Pegawai 2021 yang telah di bayar:	
Gaji Pokok PNS	Rp4.006.000,00
Tunjangan Keluarga	Rp 79.176,00
Tunjangan Fungsional	Rp 515.000,00
Pembulatan	<u>Rp 1.940,00</u>
Jumlah	<u>Rp (4.602.116,00)</u>
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan	Rp 6.015.810.398,00
- Tambahan Penghasilan PNS	Rp 3.973.788.106,00
- Tambahan Penghasilan PNS yang belum di bayar :	Rp 328.324.286,00
- <u>Honorarium Pengelola Keuangan</u>	<u>Rp 3.612.000,00</u>
Jumlah Beban Pegawai	Rp10.321.534.790,00

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan akumulasi dari Belanja Barang, dihitung dengan memperhatikan saldo persediaan Tahun Lalu dan Tahun Berjalan. Perhitungannya sebagai berikut:

Beban Bahan Habis Pakai:

• Realisasi Belanja Barang/Pakai Habis	Rp639.628.550,00
• Saldo Persediaan Per 31 Des 2021.....	Rp 657.000,00
• <u>Saldo Persediaan Per 31 Des 2022.....</u>	<u>(Rp 993.400,00)</u>
- Jumlah Beban Habis Pakal.....	Rp639.292.150,00
- Beban Bahan/Material.....	.. Rp 0,00
- Beban Cetak.....	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Beban Persediaan.....	Rp639.292.150,00

3. Beban Jasa

Beban Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Pemeliharaan, Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek

- Belanja Jasa Kantor.....	Rp359.976.615,00
- Belanja Pemeliharaan.....	Rp45.491.901,00
- Sewa Sarana Mobilitas.....	Rp60.000.000,00
- Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.....	<u>Rp96.000.000,00</u>
Jumlah Beban Jasa.....	Rp561.468.516,00

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan Realisasi atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditambah dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah berikut perhitungannya :

- Perjalanan Dinas Biasa	Rp 236.551.565,00
- <u>Perjalanan Dinas Dalam Kota.....</u>	<u>Rp 2.064.110.000,00</u>
- Jumlah Beban Perjalanan Dinas.....	Rp 2.300.661.565,00

5. Beban Penyusutan

No	Aset Tetap	Penyusutan Semester I	Penyusutan Semester II	Jumlah Penyusutan
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	353.475.293,96
3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4.	Jalan Irigasi Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	353.475.293,96

3.3 Defisit Non Operasional

Tidak terdapat Saldo Defisit Non Operasional pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

3.4 Surplus/Defisit LO

Dari realisasi pendapatan, Beban serta Defisit dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maka terjadi Defisit LO adalah sebesar (Rp14.169.648.333,86).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Saldo Ekuitas per Desember 2022 adalah sebesar **Rp639.073.674,44**. Nilai tersebut diperoleh dengan mengakumulasikan ekuitas awal 2021 dikurangi dengan surplus defisit LO ditambah dengan RK/PPKD, maka diperoleh Ekuitas Per Desember 2022. Berikut perhitungannya:

URAIAN	2022
EKUITAS AWAL	942.804.179,40
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.169.648.333,86)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	9.031.135,00
Koreksi Piutang	
- piutang TGR	
- piutang Pendapatan	
Koreksi Beban	
Koreksi Penyisihan Piutang	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi Nilai Aset Tetap	10.000.000,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(968.865,00)
- Penyusutan	
- tidak ada sejak tahun lalu	
- ke catatan extracomptable	
Koreksi Nilai Aset Non APBD	
Koreksi Nilai Aset Lainnya	
Koreksi Utang	
- Utang asuransi	
- Utang Beban	
- Utang Barang dan Jasa	
R/K PPKD	13.856.886.693,90
EKUITAS AKHIR	639.073.674,44

V. NERACA

1. ASET

a) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo
1.	Sisa Kas	0,00
2.	Pajak Pusat yang belum disetor ke Kas Negara	0,00
3.	Sisa Pengelolaan Askes/Jamkesmas	0,00
Jumlah		0,00

2) Persediaan

Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp993.400,00 dan Rp657.000,00 Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp.)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)
1.	Persediaan ATK, dll	993.400,00	657.000,00
2.	Persediaan Bahan Komputer	0,00	0,00
3.	Persediaan Perabot Kantor	0,00	0,00
4.	Persediaan Alat Listrik	0,00	0,00
Jumlah		993.400,00	657.000,00

b) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp975.221.536,44** dan **Rp947.406.295,40**. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Inspektorat yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per	Saldo per
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.736.128.119,75	3.366.090.619,75
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	940.000,00	940.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.762.839.983,31)	(2.420.281.324,35)
	Jumlah	975.221.536,44	947.406.295,40

Jumlah Aset Tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terjadi perubahan disebabkan adanya penambahan nilai Aset. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Aset	Saldo per Desember 2021	Penambahan	Pengurangan		Saldo per Desember 2022
			Mutasi	Penghapusan	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.366.090.619,75	398.375.000,00	28.337.500,00	0,00	3.736.128.119,75
Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah ASET TETAP	3.367.030.619,75	371.923.000,00	28.337.500,00	0,00	3.737.068.119,75

c.) Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp0,00**.

5.2. KEWAJIBAN

1) Utang Beban

Saldo Utang Beban terdiri dari Beban Belanja pegawai yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp336.147.862,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan Gaji Pegawai yang belum di bayar :
 - Gaji Pokok Rp6.964.420,00
 - Tunjangan Keluarga Rp 857.456,00
 - Pembulatan Rp 1.700,00
- Jumlah Kekurangan Gaji : **Rp7.823.576,00**
- Tambahan Penghasilan PNS yang belum dibayarkan : **Rp.328.324.286,00**
- **Total Utang Beban Rp.336.147.862,00**

No.	Uraian	Saldo Per Desember 2022 (Rp)	Saldo Per Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Beban	336.147.862,00	4.602.116,00
TOTAL		336.147.862,00	4.602.116,00

5.3. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp639.073.674,44**. Ekuitas dapat diperoleh dengan Mengurangi Jumlah Aset dengan Utang /Kewajiban.

Praya, 9 Februari 2023
Inspektorat Kab. Lombok Tengah
Inspektur

Drs. H. Lulu Aknal Afandi, MM
NIP. 19681231198903 1 065

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

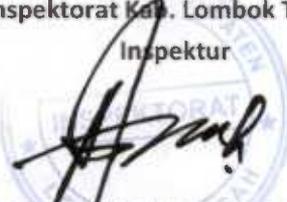
Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 , sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 9 Februari 2023

Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Inspektur


Drs. H. Halu Aknal Afandi, MM

NIP. 19681231198903 1 065

LAMPIRAN

NO URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / COLONGAN NPWP	STS KWN JMLH JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING
			GJ. POKOK TJ. STRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. BSE FUNG. UMUM TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TJ. TERPENCIL TKD TJ. BERAS TJ. PAJAK	TJ. BPJS KES PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. IWP 1% POT. IWP 8% POT. TAPERUM	HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH POTONGAN		
3	LALU BINTANG TURUNAN, S.Sos 11-09-1974 NIP. 197409112008041006 Penasia Tk. 1-3D Oktober s.d November 2022 IX KP	K-1 2 4 IX	3.861,000	0	0	0	0	0	0	4.698,500
			386,100	0	0	98	51,015	0	0	
			134,448	700,000	0	5.101,638	952,123	0	0	
			4.401,540	0	0	0	0	403,138	0	
			3.704,300	0	0	0	0	0	4.335,900	
			370,430	0	0	39	49,229	0	0	
			148,172	700,000	0	4.922,961	337,892	0	0	
			4.222,902	0	0	0	0	387,061	0	
			156,700	0	0	0	0	0	182,600	
			15,670	0	0	39	1,786	0	0	
			6,268	0	0	178,677	14,291	0	0	
			178,638	0	0	0	0	16,077	0	
			313,400	0	0	0	0	0	325,200 3	
31,340	0	0	78	3,572	0	0				
12,536	0	0	357,354	28,582	0	0				
357,276	0	0	0	0	32,154	0				
4	DAIQ VERA FEBRINA ANGRIL, S.Farm.M.Ak, 04-02-1987 NIP. 198702042011012019 Penasia Tk. 1-3D Oktober s.d November 2022 IX KP	K-1 2 4 IX	3.410,600	0	0	0	0	0	0	4.231,200
			341,060	0	0	44	45,881	0	0	
			136,424	700,000	0	4.588,128	311,047	0	0	
			3.688,084	0	0	0	0	336,928	0	
			3.272,200	0	0	0	0	0	4.087,600	
			327,220	0	0	20	44,303	0	0	
			130,888	700,000	0	4.430,328	296,625	0	0	
			3.730,308	0	0	0	0	342,728	0	
			138,400	0	0	0	0	0	143,600	
			13,840	0	0	24	1,978	0	0	
			5,536	0	0	157,800	12,622	0	0	
			157,776	0	0	0	0	14,200	0	
			276,800	0	0	0	0	0	287,200 4	
27,680	0	0	48	3,136	0	0				
11,072	0	0	315,600	25,244	0	0				
315,552	0	0	0	0	28,400	0				
JUMLAH LEMBAR KE. 2			590,200	0	0	126	6,728	0	0	
			99,020	0	0	672,954	33,826	0	0	
			23,608	0	0	0	0	60,554	612,400	
			672,828	0	0	0	0	0	0	

NO URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / GOLONGAN NPWP	STS KWN JMLH JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING
			GJ. POKOK TJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ISE FUNG. UMUM TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TJ. TERPENCIL TKD TJ. BERAS TJ. PAJAK	TJ. BPJS KES PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. IWP 1% POT. IWP 0% POT. TAPERUM	HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH POTONGAN		
9	LOUCH SYAUFU GANI S. 26-12-1970 NIP. 197012242001121002 Pegawai Muda Tk. I-3B Desember 2022 KGB	IX	3.445,500	0	0	0	0	0	0	3.314,700
			0	185,000	0	145	36,305	0	0	0
			0	0	0	3.630,643	273,640	0	0	0
			3.445,500	0	0	0	0	311,945	0	0
			3.340,300	0	0	0	0	0	0	3.222,900
			0	185,000	0	77	35,253	0	0	0
			0	0	0	3.925,377	267,224	0	0	0
			3.340,300	0	0	0	0	302,477	0	0
			105,200	0	0	0	0	0	0	95,800
			0	0	0	68	1,052	0	0	0
			0	0	0	105,288	8,416	0	0	0
			105,200	0	0	0	0	9,468	0	0
105,200	0	0	0	0	0	0	95,800			
0	0	0	68	1,052	0	0	0			
0	0	0	105,288	8,416	0	0	0			
105,200	0	0	0	0	9,468	0	0			
10	LALU NISBAN ARIWIBOWO, ST 01-04-1988 NIP. 198804012020121001 Pegawai Muda - 3A Oktober s.d. Nopember 2022 PN	IX	2.979,400	0	0	0	0	0	0	2.899,050
			257,940	185,000	0	30	31,255	0	0	0
			103,176	0	0	3.125,546	235,341	0	0	0
			2.940,516	0	0	0	0	266,496	0	0
			2.063,520	0	0	0	0	0	0	2.323,850
			206,352	185,000	0	4	25,374	0	0	0
			82,541	0	0	2.537,417	188,193	0	0	0
			2.332,413	0	0	0	0	213,367	0	0
			515,880	0	0	0	0	0	0	535,200
			51,588	0	0	26	5,881	0	0	0
			20,635	0	0	588,129	47,048	0	0	0
			588,103	0	0	0	0	52,929	0	0
1.031,760	0	0	0	0	0	0	1.070,400			
103,176	0	0	52	11,762	0	0	0			
41,270	0	0	1.176,258	94,097	0	0	0			
1.176,206	0	0	0	0	105,859	0	0			
1.136,960	0	0	0	0	0	0	0			
103,176	0	0	120	12,814	0	0	0			
41,270	0	0	1.281,526	102,513	0	0	0			
1.281,406	0	0	0	0	115,327	0	1.166,200			
JUMLAH LEMBAR KE-5			1.136,960	0	0	120	12,814	0	0	
			103,176	0	0	1.281,526	102,513	0	0	
			41,270	0	0	0	0	115,327	1.166,200	
			1.281,406	0	0	0	0	115,327	1.166,200	

NO URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PRGAWAJ / COLONGAN NPWP	STS KWN JMLH JWA	PENDHASILAN				POTONGAN			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REFERENSI
			GG. POKOK TJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. RSE FUNG. UMUM TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TJ TERPENCIL TKD TJ. BERAS TJ. PAJAK	TJ. BPJS KES PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. IWP 1% POT. IWP 6% POT. TAPERUM	HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH POTONGAN		
11	RINA BUDIANA, SE 25-03-1985 NIP. 199803252020122018 Pusat Muda -3A Oktober s.d Nopember 2022 PN	K-1	2,579,400	0	0	0	0	0	0	2,812,100
		1	257,940	185,000	0	25	30,779	0	0	0
		3	31,588	0	0	3,073,953	231,114	0	0	0
			2,888,928	0	0	0	0	261,855	0	0
			2,065,520	0	0	0	0	0	0	2,288,300
			206,352	185,000	0	18	26,961	0	0	0
			41,270	0	0	2,496,152	184,891	0	0	0
			2,311,142	0	0	0	0	209,852	0	0
		IX	515,880	0	0	0	0	0	0	525,800
			51,388	0	0	15	5,778	0	0	0
			10,318	0	0	577,801	46,223	0	0	0
			577,786	0	0	0	0	52,001	0	0
			1,031,760	0	0	0	0	0	0	1,051,600
	108,176	0	0	30	11,586	0	0	0		
	20,635	0	0	1,135,602	92,446	0	0	0		
	1,155,571	0	0	0	0	104,002	0	0		
TOTAL GOL III			5,716,620	0	0	0	0	0	0	
PEG	9		520,462	0	0	990	64,251	0	0	
IST	7		187,550	0	0	6,425,622	513,971	0	0	
ANK	13		6,424,632	0	0	0	0	578,222	5,847,400	

NO URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / COLONGAN NPWP	STS KWN JMLH JWA	PENGHASILAN				POTONGAN			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING
			GJ. POKOK TJ. BTR/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. BSE FUNC. UMUM TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TJ. TERPENCIL TKD TJ. BERAS TJ. PAJAK	TJ. BPJS KMS PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. IWP 1% POT. IWP 8% POT. TAPERUM	HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH POTONGAN		
12	LALU MUHAMAD KHADAPI 24-05-1984 NIP. 198405242014071003 Pengatur-2C Oktober s.d Nopember 2022 KP	K-1 2 4 IX ZK	2,859,800	0	0	0	0	0	0	3,145,100
			285,980	180,000	0	144	74,402	0	0	0
			134,992	0	0	3,440,316	260,814	0	0	0
			3,260,172	0	0	0	0	295,216	0	0
			2,743,800	0	0	0	0	0	0	3,024,700
			274,380	180,000	0	82	33,079	0	0	0
			109,732	0	0	3,308,014	250,235	0	0	0
			3,127,932	0	0	0	0	283,314	0	0
			116,000	0	0	0	0	0	0	120,400
			11,600	0	0	62	1,323	0	0	0
			4,640	0	0	132,302	10,579	0	0	0
			132,240	0	0	0	0	11,902	0	0
232,000	0	0	0	0	0	0	240,800			
23,200	0	0	124	2,646	0	0	0			
9,280	0	0	264,604	21,156	0	0	0			
364,480	0	0	0	0	23,804	0	0			
13	BAIQ NOVIANA WIDIASTUTI 24-11-1979 NIP. 197911242014072005 Pengatur-2C Oktober s.d Nopember 2022 KP	K-1 1 3 IX ZK	2,859,800	0	0	0	0	0	0	3,093,000
			285,980	180,000	0	92	33,830	0	0	0
			57,196	0	0	3,383,088	256,236	0	0	0
			3,202,976	0	0	0	0	290,068	0	0
			2,743,800	0	0	0	0	0	0	2,974,700
			274,380	180,000	0	19	32,931	0	0	0
			59,876	0	0	3,253,075	265,844	0	0	0
			3,073,056	0	0	0	0	278,373	0	0
			116,000	0	0	0	0	0	0	118,300
			11,600	0	0	73	1,288	0	0	0
			2,320	0	0	129,993	10,394	0	0	0
			129,920	0	0	0	0	11,693	0	0
232,000	0	0	0	0	0	0	236,600			
23,200	0	0	144	2,596	0	0	0			
4,640	0	0	259,986	20,788	0	0	0			
259,840	0	0	0	0	21,986	0	0			
TOTAL GOL II			464,000	0	0	0	0	0	0	
PEG	2		46,400	0	0	270	5,244	0		
IST	2		13,920	0	0	524,590	41,946	0		
ANK	3		524,320	0	0	0	0	47,190	477,400	

TOTAL PER SATKER		6,964,420	0	0	0	0	0	0	
PEG 14		632,172	0	0	1,700	78,225	0	0	
IST 11		225,284	0	0	7,823,576	625,751	0	0	
ANK 19		7,821,876	0	0	0	0	703,976	0	7,119,600
<i>Terbilang : Tujuh juta seratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah</i>									

Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. Lailu Akmal Afandi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 198903 1 065

Praya, 2022

Bendahara Pengeluaran,

LOUCH SYAUFU GANI S
Penata Muda (III/a)
NIP. 19701224 200112 1 002

PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : BAIQ FATMAWATI,SH
NIP : 196912312008012091
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 23.04/02.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Praya, 12 Januari 2023
PPK SKPD



BAIQ FATMAWATI,SH
NIP. 196912312008012091

KAB. LOMBOK TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 Nomor: 23.04/02.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023

Langsung Barang dan Jasa	
SPP-LS	
1. Nama SKPD/Unit Kerja	: Inspektorat
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: terlampir
3. Nama Pengguna Anggaran	: Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM
4. Nama PPTK	: Hj. BAIQ SRI DAMAYANTI WIRADARMA,SE.M, Acc
5. Nama Bendahara Pengeluaran	: Louch Syaafi Gani S
6. NPWP Bendahara Pengeluaran	: 003351194915000
7. Nama Bank	: Bank NTB Syariah
8. Nomor Rekening Bank	: 0032100231004
9. Untuk Keperluan	: Pembayaran TPP Bulan Desember 2022 pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah
10. Dasar Pengeluaran	: SPD Nomor: 23.04/01.0/000001/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023 tanggal 2023-01-05
	: Sebesar: Rp328.324.286 (terbilang: tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

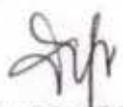
No	Uraian	
I	SPD	
	Tanggal : 2023-01-05	Nomor : 23.04/01.0/000001/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023 Rp7.324.208.887
II	SP2D Sebelumnya	
	Tanggal : -	Nomor : -

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hj. BAIQ SRI DAMAYANTI WIRADARMA,SE.M, Acc
 NIP. 197104051998032012

Praya, 12 Januari 2023
Bendahara Pengeluaran


 Louch Syaafi Gani S
 NIP. 197012242001121002



Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SIKPD
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
 Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

KAB. LOMBOK TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 23.04/02.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 23.04/02.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023			
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
1.	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp328.324.286

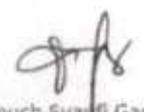
TOTAL : Rp328.324.286

Terbilang: tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
Pegguna Anggaran


Drs. H. LALI AKMAL AFANDI, MM
NIP. 196812311989031065

Praya, 12 Januari 2023
Bendahara Pengeluaran


Louh Syaifi Gani S
NIP. 197012242001121002

PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 0002/SPTJM/SPP-LS/TPP/INSP/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 23.04/02.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang kami ajukan sebesar Rp328.324.286 (terbilang tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) Untuk keperluan Inspektorat Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

**Mengetahui,
Pengguna Anggaran**


Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM

NIP. 196812311989031065

PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023		No. SPM: 23.04/03.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH supaya menerbitkan SP2D kepada:		Potongan-potongan: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Iuran Wajib Pegawai 1%</td> <td></td> <td>Rp12.675.248</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PPH 21</td> <td>027262795620151</td> <td>Rp34.286.395</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp46.961.643</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah	1	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp12.675.248	2	PPH 21	027262795620151	Rp34.286.395	Jumlah			Rp46.961.643		
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah																		
1	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp12.675.248																		
2	PPH 21	027262795620151	Rp34.286.395																		
Jumlah			Rp46.961.643																		
SKPD : Inspektorat Bendahara / Pihak Ketiga *) : LOUCH SYAUFU GANI S No. Rekening Bank : 0032100231004 Nama Bank : Bank NTB Syariah NPWP : 003351194915000 Dasar Pembayaran : 23.04/01.0/000001/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023		Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPP)																			
Untuk Keperluan: Pembayaran TPP Bulan Desember 2022 pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah		SPM yang Dibayarkan <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Jumlah yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp328.324.286</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp46.961.643</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp281.362.643</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang Dibayarkan</td> <td>Rp328.324.286</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp328.324.286	Jumlah Potongan	Rp46.961.643	Jumlah Netto	Rp281.362.643	Jumlah yang Dibayarkan	Rp328.324.286										
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp328.324.286																				
Jumlah Potongan	Rp46.961.643																				
Jumlah Netto	Rp281.362.643																				
Jumlah yang Dibayarkan	Rp328.324.286																				
Pembebanan pada kode kegiatan <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE KEGIATAN</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">SPD - 23.04/01.0/000001/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023</td> </tr> <tr> <td>6.01.01.2.02</td> <td>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> <td>Rp328.324.286</td> </tr> <tr> <td>6.01.01.2.02.01</td> <td>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>Rp328.324.286</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.02.01.0001</td> <td>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</td> <td>Rp328.324.286</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp328.324.286</td> </tr> </tbody> </table>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 23.04/01.0/000001/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023			6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp328.324.286	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp328.324.286	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp328.324.286	Jumlah		Rp328.324.286	Uang sejumlah: (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) 	
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																			
SPD - 23.04/01.0/000001/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023																					
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp328.324.286																			
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp328.324.286																			
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp328.324.286																			
Jumlah		Rp328.324.286																			
Jumlah SPP yang Diminta: Rp328.324.286 (terbilang: tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)		Praya, 12 Januari 2023 Pengguna Anggaran																			
Nomor dan Tanggal SPP 23.04/02.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023 tanggal 2023-01-12		 Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM NIP. 196812311989031065																			

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 0002/SPTJM/SPM-LS/TPP/INSP/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 23.04/03.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang saya ajukan sebesar Rp328.324.286 (terbilang tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) Untuk keperluan Inspektorat Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

**Mengetahui,
Pegguna Anggaran**



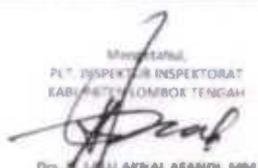
(Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM
NIP. 196812311989031065

NO	NAMA	GOL	JABATAN	Eselon	Jumlah Terima TYP	Jml Bulan	Jml Terima	Pedangan Keaktifan	Jumlah Terima setelah potongan	PPH Pst 21	Jumlah Terima Setelah PPH 21	Pol. BPJS	Jumlah Terima Setelah Pot. BPJS	TANDA	TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Drs. H. Lolo Ajmal Afandi, MM	IV/c	Inspektur	II/b	Rp. 13.600.000	1 x	Rp. 13.600.000	Rp. 548.080	Rp. 13.051.920	Rp. 1.917.788	Rp. 11.094.132	Rp. 170.284	Rp. 10.923.848	1	
2	Hj. Baidi Sri Darmayanti, S.S., M.Acc	IV/b	Sekretaris	III/a	Rp. 7.608.000	1 x	Rp. 7.608.000	Rp. 443.264	Rp. 7.164.736	Rp. 1.075.010	Rp. 6.089.726	Rp. 243.460	Rp. 5.846.266	2	
3	Drs. H. Lolo Handani, M.Si	IV/b	Itikan	III/a	Rp. 5.882.000	1 x	Rp. 5.882.000	Rp. 194.106	Rp. 5.687.894	Rp. 853.184	Rp. 4.834.710	Rp. 208.248	Rp. 4.626.462	3	
4	Akbari, SH	IV/b	Itikan II	III/a	Rp. 5.882.000	1 x	Rp. 5.882.000	Rp. 237.043	Rp. 5.644.957	Rp. 843.744	Rp. 4.781.213	Rp. 207.864	Rp. 4.573.349	4	
5	Drs. Suhada	IV/b	Itikan IV	III/a	Rp. 5.882.000	1 x	Rp. 5.882.000	Rp. 148.891	Rp. 5.733.109	Rp. 850.801	Rp. 4.872.308	Rp. 238.978	Rp. 4.633.330	5	
6	H. Muzawati, SH	IV/b	Itikan V	III/a	Rp. 5.882.000	1 x	Rp. 5.882.000	Rp. 184.690	Rp. 5.697.310	Rp. 857.596	Rp. 4.839.714	Rp. 204.964	Rp. 4.634.750	6	
7	Lulu Yusuf Anshary, ST	IV/a	Itikan II	III/a	Rp. 5.882.000	1 x	Rp. 5.882.000	Rp. 387.036	Rp. 5.494.964	Rp. 824.245	Rp. 4.670.719	Rp. 235.380	Rp. 4.435.339	7	
8	W. Pan Rahayu	IV/c	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 398.894	Rp. 5.148.106	Rp. 772.162	Rp. 4.375.944	Rp. 195.880	Rp. 4.179.064	8	
9	W. Isnan	IV/c	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 33.281	Rp. 5.513.719	Rp. 827.858	Rp. 4.685.861	Rp. 185.728	Rp. 4.500.133	9	
10	Lulu Abdulk Malik, S. Sos. MM	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 133.138	Rp. 5.413.862	Rp. 812.081	Rp. 4.601.781	Rp. 198.016	Rp. 4.403.765	10	
11	M. Anwar, SH, MM	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 882.050	Rp. 4.714.950	Rp. 198.662	Rp. 4.516.288	11	
12	Jean Yulianto, SE	IV/b	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 98.846	Rp. 5.448.154	Rp. 817.073	Rp. 4.631.081	Rp. 221.880	Rp. 4.409.201	12	
13	H. Anisa Insiyani, SH	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 11.094	Rp. 5.535.906	Rp. 836.384	Rp. 4.705.520	Rp. 221.880	Rp. 4.483.640	13	
14	Mahabidin, SH	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 44.376	Rp. 5.502.624	Rp. 825.394	Rp. 4.677.230	Rp. 202.856	Rp. 4.474.374	14	
15	Sigit Setiawan, SH	IV/b	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 11.094	Rp. 5.535.906	Rp. 836.384	Rp. 4.705.520	Rp. 221.700	Rp. 4.483.820	15	
16	Indahwati Idris, Bk	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 882.050	Rp. 4.714.950	Rp. 198.016	Rp. 4.516.934	16	
17	M. Amasudin, SP	IV/c	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 782.127	Rp. 4.764.873	Rp. 714.731	Rp. 4.050.142	Rp. 221.880	Rp. 3.828.262	17	
18	Baidi Hasmad Hattimah, S. Sos	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 98.846	Rp. 5.448.154	Rp. 817.073	Rp. 4.631.081	Rp. 221.880	Rp. 4.409.201	18	
19	Mah. Amrullah, SE	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 882.050	Rp. 4.714.950	Rp. 211.880	Rp. 4.503.070	19	
20	L. O. H. S. Sos	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 882.050	Rp. 4.714.950	Rp. 218.274	Rp. 4.496.676	20	
21	M. H. S. P	IV/a	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 882.050	Rp. 4.714.950	Rp. 221.880	Rp. 4.496.070	21	
22	Prayuda Wardani, M	IV/a	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 133.138	Rp. 5.413.862	Rp. 812.081	Rp. 4.601.781	Rp. 221.880	Rp. 4.379.901	22	
23	Lulu Kusika Zakaria, S. Sos	IV/b	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 772.350	Rp. 5.269.650	Rp. 221.880	Rp. 5.047.770	23	
24	Baidi Imlyani, STM	IV/a	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 44.376	Rp. 5.502.624	Rp. 825.394	Rp. 4.677.230	Rp. 221.880	Rp. 4.455.350	24	
25	Hadi Indary, S. M. Si	IV/a	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 44.376	Rp. 5.502.624	Rp. 825.394	Rp. 4.677.230	Rp. 221.880	Rp. 4.455.350	25	
26	Muhammad Iqbal, SE	IV/a	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 88.752	Rp. 5.458.248	Rp. 818.737	Rp. 4.639.511	Rp. 221.880	Rp. 4.417.631	26	
27	Suhardjo, S. Sos	IV/a	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 31.988	Rp. 3.900.012	Rp. 528.005	Rp. 2.982.007	Rp. 142.080	Rp. 2.839.927	27	
28	M. Nuzul Sulfitri, BA	IV/a	Pengawas Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 404.891	Rp. 5.142.109	Rp. 771.310	Rp. 4.370.799	Rp. 204.400	Rp. 4.166.399	28	
29	Lulu Maryani, S. For	IV/a	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 882.050	Rp. 4.714.950	Rp. 221.880	Rp. 4.493.070	29	
30	Gunawan, S. Sos	IV/a	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 44.376	Rp. 5.502.624	Rp. 825.394	Rp. 4.677.230	Rp. 221.880	Rp. 4.455.350	30	
31	Hidayatullah, S. P	IV/a	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 882.050	Rp. 4.714.950	Rp. 221.880	Rp. 4.493.070	31	
32	Nuzul Sulfitri, SE	IV/a	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 44.376	Rp. 5.502.624	Rp. 825.394	Rp. 4.677.230	Rp. 221.880	Rp. 4.455.350	32	
33	Baidi Isnan, SE	IV/a	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 144.222	Rp. 5.402.778	Rp. 816.417	Rp. 4.586.361	Rp. 221.880	Rp. 4.364.481	33	
34	Zaenal Wardi, S. Sos	III/d	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000	Rp. 22.188	Rp. 5.524.812	Rp. 776.241	Rp. 5.248.571	Rp. 221.880	Rp. 5.026.691	34	
35	Sri Sigit Heningkingih, S. For, M. Ak	IV/d	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 7.104	Rp. 3.924.896	Rp. 177.245	Rp. 3.747.651	Rp. 142.080	Rp. 3.605.571	35	
36	Sulman	III/d	Auditor Penyuka		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000		Rp. 3.932.000	Rp. 182.600	Rp. 3.749.400	Rp. 138.080	Rp. 3.611.320	36	
37	Ubayi Buina Indriastuti, SE	III/d	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000		Rp. 3.932.000	Rp. 177.600	Rp. 3.754.400	Rp. 142.080	Rp. 3.612.320	37	
38	Yuliana Maria, SE	III/d	Auditor Madya		Rp. 5.547.000	1 x	Rp. 5.547.000		Rp. 5.547.000	Rp. 777.390	Rp. 5.269.610	Rp. 221.880	Rp. 5.047.730	38	
39	Lulu Agul Maruyana, SH	III/d	Pengawas Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000		Rp. 3.932.000	Rp. 177.600	Rp. 3.754.400	Rp. 142.080	Rp. 3.612.320	39	
40	Baidi Fatmawati, SH	III/d	Kasubag Idum		Rp. 3.650.000	1 x	Rp. 3.650.000	Rp. 21.900	Rp. 3.628.100	Rp. 181.405	Rp. 3.446.695	Rp. 146.080	Rp. 3.300.615	40	
41	Nuzul Fauzan, ST, M. Ak	IV/d	Pengawas Muda		Rp. 3.650.000	1 x	Rp. 3.650.000		Rp. 3.650.000	Rp. 182.500	Rp. 3.467.500	Rp. 146.080	Rp. 3.321.420	41	
42	Mila Nurmayati, S. M. Ak	III/b	Pencara Ahli Muda		Rp. 3.650.000	1 x	Rp. 3.650.000	Rp. 87.600	Rp. 3.562.400	Rp. 178.120	Rp. 3.384.280	Rp. 146.080	Rp. 3.238.200	42	
43	Ahli Ubantari, ST	III/b	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 93.936	Rp. 3.838.064	Rp. 174.403	Rp. 3.663.661	Rp. 142.080	Rp. 3.521.581	43	
44	Nuzul Handani, S. For	III/b	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 56.832	Rp. 3.875.168	Rp. 174.758	Rp. 3.700.410	Rp. 142.080	Rp. 3.558.330	44	
45	Lulu Stella Zorkani, SE	III/d	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 127.872	Rp. 3.804.128	Rp. 171.204	Rp. 3.632.924	Rp. 142.080	Rp. 3.490.844	45	
46	Dwi Hardiyanto, S. Kom	III/b	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 21.312	Rp. 3.910.688	Rp. 176.534	Rp. 3.734.154	Rp. 142.080	Rp. 3.592.074	46	
47	Baidi Anis Linda Yuzriyanti, S. For	III/b	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000		Rp. 3.932.000	Rp. 177.600	Rp. 3.754.400	Rp. 142.080	Rp. 3.612.320	47	
48	Taufiqurrahman Ihsani, SE	III/c	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 83.936	Rp. 3.848.064	Rp. 174.403	Rp. 3.673.661	Rp. 142.080	Rp. 3.531.581	48	
49	Muhammad Rifal, S. Adin	III/c	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 42.624	Rp. 3.889.376	Rp. 175.469	Rp. 3.713.907	Rp. 142.080	Rp. 3.571.827	49	
50	Hadi Dwi Purnomo, SE	III/c	Auditor Muda		Rp. 3.932.000	1 x	Rp. 3.932.000	Rp. 78.144	Rp. 3.853.856	Rp. 173.593	Rp. 3.680.263	Rp. 142.080	Rp. 3.538.183	50	
Jumlah Jalan					Rp. 257.213.880		Rp. 257.213.880	Rp. 5.820.546	Rp. 251.393.334	Rp. 30.896.248	Rp. 220.497.086	Rp. 5.972.608	Rp. 214.524.478		

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN STOCK OPNAME ATAS PERSEDIAAN HABIS PAKAI
PER 30 Desember 2022

ORGANISASI : INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH
KODE ORGANISASI : 12.15.02.14

No	Nama Barang	Volume Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi			Sisa
1	Amplop coklat besar kop kristansi Spesifikasi : Besar besar		kotak/pack	40,000	0	0	0	0	0
2	Amplop coklat kop kristansi Spesifikasi : Besar sedang	1	kotak/pack	35,000	35,000	0	0	0	0
3	Amplop putih berperalat Spesifikasi : Putih, 90 Putih (100 lembar)		box	25,000	0	0	0	0	0
4	Bek stainless		buah	17,300	0	0	0	0	0
5	Binder klip besar Spesifikasi : Binder Klip No. 200 1 box besar		kotak	25,100	0	0	0	0	0
6	Binder klip sedang Spesifikasi : Binder Klip No. 200 1 box besar		buah	17,300	0	0	0	0	0
7	Bolpoint biasa Spesifikasi : Merk Faber		lusri	46,300	0	0	0	0	0
8	Kwitansi Spesifikasi : Buku Kwitansi 100		buah	16,100	0	0	0	0	0
9	Lem kertas Spesifikasi : Isi 200 gram		buah	6,900	0	0	0	0	0
10	Spidol Spesifikasi : Permanent/Marker		pcs	7,700	0	0	0	0	0
11	Spidol Spesifikasi : Whiteboard non permanent		buah	9,000	0	0	0	0	0
12	Stapelo Spesifikasi : Stapelo		buah	10,500	0	0	0	0	0
13	Penel Spesifikasi : 2B		buah	4,000	0	0	0	0	0
14	Klip Spesifikasi : Klip Merk Sea Gull	6	kotak	6,400	38,400	0	0	0	0
15	Klip Spesifikasi : Klip kertas kecil		kotak	3,800	0	0	0	0	0
16	Tempes Spesifikasi : botol kecil		buah	4,500	0	0	0	0	0
17	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwitansi 100		buah	16,100	0	0	0	0	0
18	Buku Ekspedisi , isi 50 lbr Spesifikasi : 32x21 cm		buah	11,700	0	0	0	0	0
19	Box File Spesifikasi : Gordle plastik halus		buah	25,700	0	0	0	0	0
20	Map Spesifikasi : Map Ordener plastik ukuran besar		buah	32,200	0	0	0	0	0
21	Map Biasa (Stop Map) Spesifikasi : Bahan Kertas, ukuran F4 216x330mm		pak	34,800	0	0	0	0	0
22	Penggaris Spesifikasi : Garisan Besi 30 cm		buah	7,000	0	0	0	0	0
23	Penggaris Spesifikasi : Garisan Besi satu meter		buah	22,400	0	0	0	0	0
24	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter ulk. Besar		buah	22,500	0	0	0	0	0
25	Staples Spesifikasi : Hecker /staples) Utk. 24/6 Merk Lion		buah	32,200	0	0	0	0	0
26	Isi Staples Spesifikasi : Utk. No. 1212 (besar)		kotak	32,200	0	0	0	0	0
27	Staples Kecil Spesifikasi : HD 10		buah	16,500	0	0	0	0	0
28	Isi Staples Sedang Spesifikasi : No.3-1M, 24/6, teg length 6mm, 1000staples		Kotak	14,300	0	0	0	0	0
29	Pelubang kertas Spesifikasi : Ukuran Besar (biasa)		buah	45,000	0	0	0	0	0
30	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Utk. besar, isi 5 pcs		tube	20,000	0	0	0	0	0
31	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 Putih 70 gram	4	rim	57,500	230,000	0	0	0	4
32	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Warna 70 gram	12	rim	57,500	690,000	0	0	0	12
33	Kertas Spesifikasi : Kertas Buffalo		lembar	9,600	0	0	0	0	0
34	Stempel Biasa Spesifikasi : -		buah	25,000	0	0	0	0	0
35	Refil tinta printer laserjet Spesifikasi : Tinta Hitam		kali	100,000	0	0	0	0	0
36	Tinta printer hitam Spesifikasi : Epson		botol	125,000	0	0	0	0	0
37	Tinta printer warna biru Spesifikasi : Epson		botol	125,000	0	0	0	0	0
38	Tinta printer warna kuning Spesifikasi : Epson		botol	125,000	0	0	0	0	0
39	Tinta printer warna merah/magenta Spesifikasi : Epson		botol	125,000	0	0	0	0	0
40	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Bocor semprot		Buah	50,000	0	0	0	0	0
41	Pencabutan Toilet Spesifikasi : -		Buah	17,000	0	0	0	0	0
42	Pembersih lantai Spesifikasi : -		Buah	30,000	0	0	0	0	0
43	Kanebo Spesifikasi : -		Buah	31,000	0	0	0	0	0
44	Sabun cuci tangan cair Spesifikasi		buah	20,000	0	0	0	0	0
45	Batu Baterai Spesifikasi : Ukuran A3/L Set isi 21		Set	14,000	0	0	0	0	0
Jumlah Okname Bulan Ini					993,400				31

Mengantah,
PLT INSPEKTOR INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. H. YUNI AKRAL AFANDI, MM
NIP. 196612311989031065

